

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Menurut (Triyuwono, 2006) yang dikutip oleh (Permatasari dan Dewi, 2011) menyatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi Islam ada 3 antara lain meliputi akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas kepada alam. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menerapkan syari'ah Islam dalam upaya untuk mempertahankan amanah yang diberikan Allah SWT. Sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan cara memberikan laporan-laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas organisasi. Sehingga realisasi

kegiatannya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mendapat kejelasan (Kama, 2011). Silvia dan Ansar (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki berbagai dimensi dalam organisasi antara lain yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial.

a. Tahapan Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Personal yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan diri sendiri.
2. Akuntabilitas Individu yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.
3. Akuntabilitas Tim yaitu akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.
4. Akuntabilitas Organisasi yaitu akuntabilitas Internal atau Eksternal di dalam organisasi.
5. Akuntabilitas Stakeholder yaitu akuntabilitas terpisah antara stakeholders dan organisasi.

(www.kajianpustaka.com:12)

b. Indikator Nilai-Nilai Dasar Akuntabilitas

Adapun indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain yaitu:

1. Kepemimpinan.
pimpinan memberikan contoh pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan segala pekerjaan

2. Transparansi.

Keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya akuntabilitas.

3. Integritas

Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku didalam organisasi maupun kelompok.

4. Responsibilitas

Kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa pasti ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, oleh karena itu maka adanya tuntunan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah di ambil.

5. Keadilan

Landasan utama dari akuntabilitas yang harus dipelihara dan juga dipromosikan karena ketika terjadi ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang akan mengakibatkan kinerja tidak optimal.

6. Kepercayaan

Rasa keadilan nantinya secara tidak langsung akan membawa pada suatu kepercayaan.

7. Keseimbangan

Keseimbangan tentang kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimilikinya.

8. Kejelasan

Mengetahui kewenangan, misi organisasi dan peran, tanggungjawab, kinerja organisasi dan sistem pelaporan kinerjanya

9. Konsistensi

Menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel.

(www.lecturer.ppns.ac.id/akuntabilitas)

2.1.2 Dimensi Akuntabilitas

2.1.2.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Perilaku yang Islami adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan *muhasaba* (menghitung-hitung/ mengevaluasi) diri terhadap pihak lain. Oleh karena itu, kaum Muslimin harus kembali kepada Allah, mengisntropeksi diri mereka, menerapkan perilaku Islami, beriman dan jujur (Muhamad, 2002). Namun, secara kenyataannya kedalaman hati seseorang bahwa dia sudah melakukan “kejujuran” hanya Tuhan yang tahu, sehingga dalam prakteknya sulit untuk mengukur mengenai tingkat kejujuran itu sendiri. Tetapi lewat pengawasan dan aturan-aturan yang diberlakukan secara tegas dapat membantu seseorang untuk transparan dan akuntabel (Silvia dan Ansar, 2011).

Suatu jaminan mengenai adanya peraturan terkait dengan supermasi hukum atau peraturan lain dalam organisasi tersebut dengan akuntabilitas hukum (Silvia dan Ansar, 2011).

Pertanggungjawaban secara hukum terkait dengan adanya suatu jaminan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dalam pelayanan publik, antara lain:

- a. Seluruh mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada ketentuan yang mengaturnya.
- b. Setiap penyimpangan harus diproses dan diberi sanksi (*punishment*) menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat melahirkan efek jera bagi pelakunya. Namun pada saat yang sama yang berprestasi harus pula diperhatikan penghargaan (*reward*) untuknya, sehingga termotivasi untuk bekerja lebih baik. Hamid (2003)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), sehingga dapat menjamin sebuah

praktik yang sehat. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002), menyebutkan bahwa akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu hal yang mutlak, sebab dengan begitu indikator untuk menilai atau mengukur tingkat akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan aktifitas khususnya di bidang pelayanan publik dapat terwujud dengan sendirinya (Kama,2011)..

2.1.2.2 Akuntabilitas Program

Berkaitan dengan bagaimana organisasi melahirkan sebuah program yang mengacu pada strategi dalam pencapaian visi, misi organisasi (Silvia dan Ansar, 2011). Diperlukan pengungkapan pelaporan hasil program kegiatan organisasi, sehingga dapat mengetahui besarnya sumberdaya yang dialokasikan kegiatan yang telah terlaksana.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas program antara lain :

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf yang bersangkutan dalam melahirkan suatu program.

- b. Dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya yang ada.(Kama,2011)

2.1.2.3 Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal prosedur administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi (Hamid, 2003).

Prosedur administrasi antara lain :

- a. Pembagian & pengarahan kerja, terdiri : adanya pendelegasian wewenang, uraian tugas, rapat pimpinan dan pengurus organisasi yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Kecukupan sistem informasi manajemen, yang terdiri dari: Pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengurusan, data program kegiatan, data keuangan), dan kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi.

Akuntabilitas proses harus menyajikan penjelasan tentang kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus organisasi yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang

dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan (Kama, 2011).

2.1.2.4 Akuntabilitas Kebijakan

Suatu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pegangan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dari para pengurus organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi (pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur organisasi) dilandasi kesepakatan², dan pertimbangan seluruh anggota organisasi dalam membuat suatu kebijakan (Silvia dan Ansar, 2011). Kesepakatan tersebut harus didokumentasikan agar jelas dan dapat dijadikan pedoman yang diterapkan organisasi secara konsisten. Organisasi juga perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sutedjo, 2009).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki cakupan yang luas, bukan hanya pertanggungjawaban financial dalam bentuk laporan keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, sebagai pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

2.1.2.5 Akuntabilitas Financial

Menurut (Muhammad, 2002) Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang diikuti oleh para pembuat laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability. Akuntansi Syariah pada intinya yaitu akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandang Islam.

Komponen pembentuk akuntabilitas financial diantaranya yaitu pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan :

a. Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya (Muhamad, 2002). Pengungkapan laporan keuangan harus berdasarkan pada aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi dalam proses operasional organisasi.

b. Ketaatan terhadap Peraturan

Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi (Muhamad, 2002).

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Masjid

a. Pengertian Masjid

Masjid merupakan tempat untuk kegiatan ibadah dan muamalah bagi umat Islam. Bermunculan masjid di perkantoran, kampus, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Sehingga masjid memerlukan pengelolaan yang terampil dan profesional. Masjid tidak semata-mata sebagai tempat shalat dan pengajian saja tetapi juga untuk segala kegiatan yang bisa membawa kemaslahatan dunia dan akhirat (Sari, 2011). Sedangkan menurut (Bastian, 2007:216) menerangkan bahwa Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dana. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan rutin masjid seperti infaq untuk khatib Jumat. Biaya ini juga termasuk biaya perawatan dan pemeliharaan masjid yang merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus masjid

untuk memikirkan dan mencari dana untuk kemakmuran masjid (Ayub *et al*, 2005:57).

b. Pengelolaan Keuangan Masjid

Menurut Syarifudin (2005) dalam Adi Purnama Yusuf (2012) Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya yang bertugas di bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan pencatatan sumber penerimaan kas, pengeluaran serta pertanggungjawaban penggunaan sumber penerimaan, dalam hal ini sumber penerimaan masjid.

b.1. Sumber Dana

Semua kegiatan Masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kurang baiknya pembiayaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan yang telah direncanakan atau di programkan. Oleh karena itu masalah ini perlu adanya suatu perencanaan sumber-sumber dana yang baik. Beberapa kegiatan penggalian dana dapat dilakukan antara lain :

1. Donatur Tetap

Yaitu sumbangan dari jama'ah atau masyarakat yang secara periodik memberikan infaq.

2. Donatur Tidak Tetap

Yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan.

Contoh : kepada instansi swasta ataupun pemerintah, lembaga donor atau simpatisan.

3. Donatur Bebas

Yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama'ah sendiri maupun pihak luar yang bersifat insidental. Hal ini dilakukan dengan penggalangan dana masyarakat dan menyediakan kotak amal.

4. Usaha Ekonomi

Yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dibidang jasa dan perdagangan.

b.2. Penganggaran Kegiatan

Perencanaan keuangan dalam melaksanakan program kerja dilakukan secara periodik. Perencanaan ini meliputi penerimaan dan pengeluaran dana secara detail dan jelas, sehingga rencana pendapatan dan

kebutuhan biaya operasional, insya Allah dapat diperkirakan.

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran
 - a. Masing-masing bidang kerja pengurus menjabarkan program kerja hasil musyawarah jama'ah untuk kegiatan tahunan
 - b. Melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalannya.
 - c. Melakukan penghitungan biaya dan pendanaan atas masing-masing kegiatan yang direncanakan.
 - d. Mengajukan anggaran yang telah disusun masing-masing bidang pada Rapat Kerja Pengurus.
 - e. Melakukan Integritasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas.
2. *Budgeting* (Penganggaran)
 - a. Melalui rapat kerja pengurus menyusun anggaran pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Diusahakan dalam penyusunan anggaran pengurus memiliki sumber dana yang jelas agar tidak mengalami defisit. Beberapa yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana.
2. Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas.
3. Memberi toleransi anggaran sebesar (+) 10% atau lebih sebagai *safety*.
4. Jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angka-angkanya dengan jelas.
5. Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP).

b.3. Lalu Lintas Keuangan

a. Pengumpulan.

Pengumpulan dana dikoordinasi oleh pengurus bidang dana dan perlengkapan yang berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk keseluruhan kegiatan. Pengurus melakukan beberapa aktifitas penggalangan dana, diantaranya mengajukan proposal, aktifitas jasa dan ekonom dan lain sebagainya.

b. Pemasukan dan Pengeluaran.

Dana yang telah dikumpulkan bidang dana dan perlengkapan selanjutnya diserahkan kepada bendahara dengan diketahui Ketua Umum, Hal ini dilakukan dengan mekanisme *Form* penyerahan dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam kas keuangan takmir masjid.

Untuk pengeluaran dana perlu diperhatikan adanya kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. Bidang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dana kepada ketua umum dengan mengisi *form* permintaan uang muka. Apabila disetujui, selanjutnya bendahara mengeluarkan dana sesuai yang dimaksudkan.

Demikian pula, dalam penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan pada bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan melampirkan laporan keuangan, atau juga dipertanggungjawabkan dengan mengisi *form* pertanggungjawaban uang muka.

c. Pengawasan

Aktivitas pengumpulan dana oleh pengurus pada bidang dana dan perlengkapan maupun pengelolaan

dana oleh bendahara perlu dilakukan pengontrolan.

Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Lembar Bukti

Beberapa lembar bukti yang bisa digunakan antara lain: nota, kwitansi, deklarasi, kupon dan lain sbagainya.

2. Lembar Informasi

Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana tiap bulan sampaikan oleh bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara.

3. Papan Pengumuman

Informasi keuangan takmir masjid yang ditempelkan atau dipublikasikan pada papan pengumuman.

4. Laporan rutin.

Pengurus bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum rapat umum maupun laporan tahunan pengurus, hal ini juga disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus pada saat musyawarah jama'ah.

5. Forum atau Lembaga Pengawas.

Beberapa forum atau lembaga yang bisa melakukan pengawasan secara langsung antara lain :

1. Rapat Umum.
2. Rapat Pleno.
3. Dewan Penasehat.

(<http://agushariwiyono.blogspot.com>)

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang memiliki hasil dan kesimpulan masing-masing :

Tabel 2.1

Hasil penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis (Tahun)	Pendekatan	Hasil Penelitian
1.	AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI MASJID Dahnil Anzar	Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kasus (<i>Case Study</i>) yakni, pengamatan	1. Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan

	<p>Simanjuntak</p> <p>Yeni Januarsi</p> <p>Tahun 2011</p>	<p>secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu.</p> <p>Penelitian ini melibatkan data kualitatif, serta menggunakan <i>Logic Analytic</i></p>	<p>pertanggungjawaban.</p> <p>2. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo.</p> <p>3. <i>Clash Jurisdictional</i> tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat Islam.</p>
--	---	---	---

2.	<p>AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI MASJID</p> <p>(Studi Kasus di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo) Abdul Latif (2014)</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup organisasi Masjid.</p>	<p>1. Akuntansi dalam pengelolaan keuangan Masjid disadari oleh para pengurus Masjid memiliki peran yang sangat penting.</p> <p>2. Model pengelolaan yang dipakai oleh pengurus Masjid yaitu model pencatatan sederhana, yaitu mencatat aliran kas masuk dan aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo.</p>
3.	<p>AKUNTABILITAS KEUANGAN MASJID DALAM PERSPEKTIF ISLAM</p> <p>M. NUR ILMAN RUKNUDDIN (2016)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena</p>	<p>Kesimpulan pertama adalah bahwa Masjid Nurul Iman Bungin telah melakukan hal-hal yang mencerminkan akuntabilitas menurut Islam</p> <p>Kesimpulan kedua adalah akuntabilitas keuangan masjid menurut Islam menghendaki kesadaran</p>

		<p>penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktek akuntabilitas Masjid Nurul Iman Bungi dan untuk mengetahui serta menemukan akuntabilitas keuangan masjid menurut Islam di Masjid Nurul Iman Bungi.</p>	<p>akan pertanggungjawaban kepada Allah dan kepadamannya serta alam.</p>
4.	<p>KONSEP AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan</p>	<p>Proses pengelolaan keuangan Gereja dilakukan oleh pemangku jawatan masing-masing Gereja. Uang yang diperoleh dari sidang</p>

	<p>ORGANISASI KEAGAMAAN (Studi Kasus pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, Distrik Jawa Timur dan Bali) Komang Gede Suriani Suan Dewi, Ananta Wikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adiputra (2015)</p>	<p>metode penelitian kualitatif. Analisis penelitian dilakukan dengan metode Studi Kasus. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan di lapangan,</p>	<p>jemaat akan dicatat dalam Oasys. Hasil pencatatan ini akan menjadi alat pertanggungjawaban keuangan yang dimulai dari tingkat Gereja ke Penghantar Distrik, Penghantar Distrik kepada Kantor Cabang Yogyakarta, dan Kantor Cabang Yogyakarta kepada Kantor Pusat Bandung. Proses pengelolaan keuangan GKBI dijamin oleh penerapan sistem akuntansi berbasis teologi dan pelibatan tenaga profesional dalam pengelolaan keuangan Gereja Pusat. Sistem pengelolaan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan keuangan uang persembahan/kurban dan pengelolaan keuangan dana sosial.</p>
5.	REKONSTRUKSI	Analisis data	Penelitian ini berhasil

	<p>KONSEP AKUNTABILITAS ORGANISASI GEREJA: (Studi Etnografi Kritis Inkulturatif pada Gereja Katolik di Tana Toraja) Fransiskus Randa (2011)</p>	<p>dilakukan berdasarkan hasil catatan etnografi yang telah dibuat sebelumnya. Tahapan analisis data meliputi deskripsi temuan, pemaknaan dan rekonstruksi.</p>	<p>merumuskan makna dan model akuntabilitas pada masing-masing dimensi yaitu akuntabilitas spiritual, kepemimpinan dan keuangan. Penelitian ini juga memperkuat hasil riset sebelumnya bahwa dalam organisasi keagamaan akuntabilitas yang dibangun tidak terlepas dari kepercayaan para pengikut dan pemimpinnya yang menjadi dasar dimensi akuntabilitas spiritual. Penelitian ini juga menempatkan Gereja Katolik sebagai salah satu organisasi yang <i>expressive</i> yang cenderung menolak praktik akuntabilitas keuangan karena terikat dengan aturan dan kepentingan para pemimpinnya.</p>
--	---	---	--

Sumber: Simanjuntak. Dkk (2011), Latif (2014), Ruknuddin (2016),
Dewi. Dkk (2015), Fransiskus Randa (2011).

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

